



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**HEPY SRIWAHYUNI**

**11727201891**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB  
PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANGKINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum

**KONSENTERASI: HUKUM TATA NEGARA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang (Studi Kasus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu)”* yang ditulis oleh:

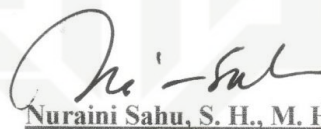
Nama : HEPY SRIWAHYUNI  
NIM : 11727201891  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat menerima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Zulqo'dah 1442 H

07 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi



Nuraini Sahu, S. H., M. H.

NIK.19590711 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang*" yang ditulis oleh :

Nama : Hepy Sriwahyuni  
 NIM : 11727201891  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Lysa Anggrayni, SH., MH**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HEPY SRIWAHYUNI  
 NIM : 11727201891  
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGUN JAYA, 22 MEI 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM  
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*):  
EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020  
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANGKINANG.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*) dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*) saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 SEPTEMBER 2021  
 Yang membuat pernyataan



HEPY SRIWAHYUNI

NIM : 11727201891

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

**Hepy Sriwahyuni, (2021): Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 yang dikategorikan sebagai bencana nasional, COVID-19 menyebabkan ketidakstabilan baik dari dunia pendidikan, perekonomian dan produktivitas masyarakat. Sejalan dengan Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Salah satu yang mendapatkan insentif adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tapi kenyataan di masyarakat masih ada pelaku UMKM yang melakukan pembayaran PPh Final, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) yang menjelaskan bahwa UMKM mendapatkan insentif pajak berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah (DPT). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektivitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan bagaimana dampak hukum dari pengimplementasian PMK tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan dampak hukum dari pengimplementasian PMK tersebut.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan sosiologis hukum (yuridis empiris). Sumber data yang digunakan mencakup sumber primer yaitu: hasil wawancara responden penelitian dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian, dan sumber tersier yaitu karya tulis ilmiah, jurnal, *website*, kamus. Teknik yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menarik kesimpulan secara induktif.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dengan studi kasus UMKM di Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) kesulitan mendapatkan informasi, (2) gagap teknologi, (3) sosialisasi atau pendidikan mengenai perpajakan yang kurang maksimal, (4) kesadaran masyarakat (pelaku UMKM) yang masih rendah. Kemudian dampak hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berdampak kepada Pemerintah, WP yang mendapatkan insentif pajak PPh Final dan WP yang tidak mendapatkan insentif pajak PPh Final.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Insentif Pajak, UMKM.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan izin- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ilmu yang telah diimpahkan sehingga kita mampu berada di zaman yang terang benerang ini. Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini untuk mendatangkan manfaat. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Saifudin dan Ibunda Wiwik Sungkawati, S.Pd., yang telah memberikan ketulusan, kasih sayang, pengorbanan agar kami sebagai anak-anaknya mampu berdiri dalam situasi saat ini.
2. Keluarga tercinta, Nenek, Abang, Kakak dan Adik; Hj. Toyibah, Hj. Gitun, Yusuf Efendi, Siti Maya Rukma, Nurul Azizah, Taufik Hidayat, Aulia Choirunnisa, Adnan Zaakif Efendi dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Prof.Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Asril, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang bersedia memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dra. H. Irdamisraini, M.A., selaku Pembimbing Akademik yang bersedia membimbing penulis sampai dengan saat ini.
8. Seluruh tenaga pendidik; Dosen- dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus pada Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengorbankan segala upaya untuk melahirkan anak bangsa yang berakhlak dan cerdas.
9. Bapak/ Ibu Karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudi berkerja sama dalam segala hal sedari awal penulis mengijakkan kaki sampai dengan sekarang.
10. Bapak/Ibu Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkang serta Bapak/Ibu Karyawan Direktorat Jendral Pajak Provinsi Riau yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengerjaan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017, terutama Kelas Ilmu Hukum D serta kakak tingkat jurusan Ilmu Hukum terkhusus Al-Mario, S.H., Zuhri Masykuron, S.H., dan Gandi Al-Fajri, S.H., terimakasih atas bimbingan dan arahan yang luar biasa.
- Sahabat-sahabat yang luar biasa: Wahlf Abi Dian, S.Kom, Dede Irawan, S.T., Sri Indah Lestari, Retno Ayu Widiyastuti, S.Kep., Lettisia Nurdayenti, S.Kom., Nindy Maulani Putri, Maulidya Daulay A.Md. Ftr., Ainun Wiwit Lestari, S.Pd., Fitrah Amaliah, S.Pd., Sri Rahayu, Robintang Br. Sihombing yang selalu menemani penulis dalam menjalani hari-hari dengan keikhlasan.
- Teman-teman yang istimewa: Lucy Anggraini, S.H., Indah Wulan Anggini, S.H., Cici Rianci, S.H., Cheny Clever Choarcol, S.H., teman-teman Magang di Penghubung Komisi Yudisial, teman teman KKN Desa Bangun Jaya terimakasih sudah memberikan banyak makna dalam kehidupan yang fana ini.
- Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata kepada seluruh pihak penulis ucapkan terimakasih, semoga kebaikan serta pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, aamiin.

Pekanbaru, 06 Juli 2021  
Penulis

**HEPY SRIWAHYUNI**  
**NIM. 11727201891**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	16
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	16
2. Kelembagaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	18
B. Desa Bangun Jaya .....	23
1. Gambaran Umum Desa Bangun Jaya .....	23
2. Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Jaya .....	28
C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	28
D. Dasar Hukum Insentif Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	35
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pajak .....	37
B. Insentif Pajak .....	46
C. Teori Efektivitas Hukum .....	47
D. Teori Kepatuhan .....	53



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 .....	55
B. Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 dalam Bidang UMKM di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu .....	68

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Table I.1 Sample .....	10
Table II.1 Prasarana Pendidikan .....	24
Tabel II.2 Sarana Kesehatan .....	24
Tabel II.3 Tempat Peribadatan .....	24
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan .....	25
Tabel II.5 Kondisi Perekonomian .....	26
Tabel II.6 UMKM Pada Tahun 2018 .....	31
Table II.7 UMKM Pada Tahun 2019 .....	31
Table IV. I Data UMKM yang Mendapatkan Insentif Pajak PPh Final Bulan April- Desember 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	59
Table IV.2 Data UMKM yang Mendapatkan Insentif Pajak PPh Final Bulan April- Desember 2020 di Kabupaten Rokan Hulu .....	59
Table IV.3 Tanggapan Pelaku UMKM terhadap Adanya Insentif Pajak oleh Pemerintah Bagi Pelaku UMKM di Desa Bangun Jaya .....	60
Table IV.4 Tanggapan Pelaku UMKM terhadap Sudah Baiknya Pelaksanaan Insentif Pajak untuk Pelaku UMKM oleh Pemerintah di Desa Bangun Jaya .....	62
Table IV.5 Tanggapan Pelaku UMKM terhadap Mudah di Dapatnya Informasi Insentif Pajak untuk Pelaku UMKM di Desa Bangun Jaya .....	63
Table IV.6 Tanggapan Pelaku UMKM di Desa Bangun Jaya terhadap Sulitnya Mengurus Insentif Pajak .....	64
Table IV.7 Pelaku UMKM Pelaku UMKM di Desa Bangun Jaya Masih Melakukan Pembayaran PPh Final .....	66



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .....	19
Gambar II.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Bangun Jaya .....	28



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang sifatnya memaksa didasarkan oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Rochmat Soemitro mendefenisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang bersifat wajib kepada kas Negara dengan jasa timbal balik yang digunakan dalam pengeluaran umum. Pasal 23A menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang<sup>2</sup>. Pungutan pajak harus memperhatikan asas *convenience* atau pembayaran pajak Wajib Pajak harus dalam keadaan yang menyenangkan serta memudahkan bagi wajib Pajak (Adam Smith)<sup>3</sup>. *International Tax Glossary* menyebutkan pemungutan pajak harus didasarkan pada *ability to pay principle* atau harus melihat kemampuan penduduk untuk membayar pajak<sup>4</sup>. Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) diartikan sebagai kemauan tanpa adanya paksaan baik dari Wajib Pajak perorangan dan etintas pajak lainnya dalam mematuhi ketentuan hukum dan administrasi pajak yang berlaku tanpa

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Pajak, *Fungsi Pajak*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> pada 17 September 2020

<sup>2</sup> *Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945*

<sup>3</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 23

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 82-83

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya penegakan hukum<sup>5</sup>. Direktorat Jendral Pajak menggolongkan kepatuhan dalam dua hal yaitu: a) kepatuhan formal (penyampaian SPT Tahunan), dan b) kepatuhan materil (jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak).

Berkenaan dengan wabah COVID-19 yang merupakan bencana nasional setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. COVID-19 berdampak pada perekonomian dalam negeri, dan sebagaimana kebijakan pemerintah mengenai *lockdown* dan *Work From Home* (WFH) mengakibatkan perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintahan ataupun swasta dan sebagian besar pusat perbelanjaan yang harus ditutup. Dikutip dari [bisnis.tempo.co](https://bisnis.tempo.co) bahwasannya 47% UMKM mengalami kebangkrutan disebabkan COVID-19. Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM berpendapat bahwa COVID-19 mempengaruhi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam keadaan bencana Pemerintah mengeluarkan aturan yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 19 perluasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 19 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Virus Corona.

---

<sup>5</sup> Andri Marfiana, *Tren Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset*, (Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2019), h. 10-16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM<sup>6</sup>. UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, bahkan dapat diibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian negara, karena jumlah UMKM yang besar daripada perusahaan-perusahaan besar<sup>7</sup>, dilihat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi nasional dengan nilai tambah nasional, dan peningkatan ekspor nonmigas<sup>8</sup>. UMKM terbagi atas tujuh sektor bisnis yaitu sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perternakan, sektor perikanan, dan sektor jasa<sup>9</sup>.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto” dan pada ayat (3) bahwa “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung pemerintah”. Sehingga sangat jelas bahwa adanya pemberian insentif pajak oleh pemerintah kepada Wajib Pajak terdampak, dan di ayat (7) dijelaskan bahwa pemberian insentif pajak dilakukan dari bulan April- Desember 2020.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>7</sup> Koesrianti, Dhina Puspitawati, dan Tri Andjarwati, *Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah “Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan: Surat Ijin Usaha Perdagangan/ SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan/ TDP”*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), h. 1

<sup>8</sup> Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h. 6

<sup>9</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: LPPI, 2015), h. 36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Keterangan dari Bapak Hombing selaku pelaku UMKM bahwasanya kabar mengenai insentif pajak sudah tersebar hanya saja sulit untuk mengurusannya jika melalui jaringan/ *daring* apalagi bagi pelaku UMKM yang sedang bermasalah mengenai pembayaran pajak. Dikutip dari [katadata.co.id](http://katadata.co.id) bahwasannya sekitar 2,3 juta UMKM masih melakukan pembayaran PPh Final meskipun adanya aturan Insentif Pajak oleh Pemerintah.

Layaknya Peraturan Pemerintah yang masih memiliki kekurangan dalam pengimplementasian serta pelaksanaannya penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah tentang: **Efektifitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.**

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian yang dilakukan lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 khususnya dalam UMKM serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, dan dampak hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 .

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 dalam bidang UMKM?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19.
- b. Untuk mengetahui dampak yang dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/03/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 dalam bidang UMKM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

### b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020.
- 3) sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### c. Secara Akademis

- 1) Bagi penulis penelitian ini menambah wawasan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di masyarakat.

- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang ditujukan untuk kepentingan tertentu. Secara ilmiah maksudnya kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Sedangkan empiris merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematis diartikan dalam menjalankan proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu dan memiliki sifat yang logis.

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian empiris adalah penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>10</sup> Ilmu hukum empiris merupakan ilmu hukum yang

<sup>10</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat hukum sebagai fakta sebagai gejala (tanda suatu peristiwa) yang dapat diamati dan bebas dinilai.<sup>11</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhir penelitian akan menuju pada penyelesaian masalah.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Jalan Jl. Cut Nyak Dien No. 4, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru dengan studi kasus di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Sebagai subjek penelitian adalah Wajib Pajak UMKM, yaitu seluruh pengusaha dan atau pedagang dibidang sandang, pangan, otomotif

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008) h. 81

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) h. 175



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Kantor Pajak Pratama Bangkinang. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah efektifitas insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 khususnya dalam bidang UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>13</sup>

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>14</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan metode pengambilan data dari populasi yang menetapkan persyaratan oleh penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafiika, 2011), h. 122

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011), h. 155

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table I.1**  
**Tabel Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pimpinan dan Staff KPP Pratama Bangkinang	58 orang	1 orang	1,7%
2.	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	50 orang	25 orang	50%
Jumlah				100%

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di perolehnya data.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali *Op Cit*, h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan penelitian terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum yang terkait dengan permasalahan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, *website*, majalah, surat kabar, dan sebagainya

**6. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengklasifikasi data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumen tidak resmi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penentuan Membuat Tesis, Skripsi dan Makalah*, (Bandung : Jemmars, 1988) h. 58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara teratur mengenai fenomena- fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data secara langsung ataupun tidak langsung melalui observasi kepada responden (Peaku UMKM), dan Pegawai KPP Pratama Bangkinang.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan interaksi antara dua orang untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tertentu yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>18</sup>

#### c. Angket

Angket (kuisisioner) merupakan alat yang digunakan untuk penelitian yang terdiri dari susunan pertanyaan secara tertulis. Angket digunakan untuk mendapatkan tanggapan dari responden dan digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan.

#### d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui kajian buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), h. 136

<sup>18</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127

<sup>19</sup> M. Hajar, *Metode Penelitian Huku*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah dan mengategorikan data yang digunakan dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisa data dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa dan mengategorikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan penelitian deskriptif. Kemudian dalam penarikan kesimpulan yang mencakup hasil pembahasan dan analisa data, penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan hal-hal yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan yang sifatnya khusus kepada penulisan umum.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, UMKM di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan Kelembagaan Kantor Pajak Pratama Bangkinang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini yaitu tentang Efektifitas Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak COVID-19.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai efektifitas serta akibat hukum dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

#### A. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

##### 1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

###### a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang atau yang disebut dengan KPP Pratama Bangkinang merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang berwenang dalam penanganan pajak yang mencakup wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.DI/2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak, yang beroperasi mulai tanggal 27 Mei 2008, setelah dikeluarkannya keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-95/PJ/2008 pada tanggal 19 Mei 2008.<sup>20</sup>

KPP Pratama Bangkinang pada mulanya dikenal dengan KP PBB Pekanbaru yang terbentuk pada tahun 1961, kemudian diubah dengan nama Direktorat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan surat keputusan daerah Nomor 0141/M/VI/5/1966 dan diresmikan pada 31 Juni 1966, bersamaan dengan itu dibentuk pula KDL IPEDA (kantor Luar IPEDA) yang wilayah kerjanya mencakup Bangkinang. Kemudian KDL diubah menjadi Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan

<sup>20</sup> Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Keuangan RI Nomor KEP 1945/MK/5/II/1976 bahwasanya KAPEDA diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru.<sup>21</sup>

Pada 1 April 1999 Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian saat ini dikenal dengan KPP Pratama Bangkinang yang kedudukannya berada dibawah pengawasan dari Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

**b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

Pada dasarnya Visi serta Misi KPP Pratama Bangkinang sama dengan Direktorat Jendral Pajak, adapun yang menjadi Visi dan Misi adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

**1) Visi**

Instansi yang dipercaya dalam Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efektif, Efisien, Berintegritas serta Berkeadilan untuk mencapai Perekonomian Indonesia yang Produktif, Inklusif, Kompetitif dan Berkeadilan.

**2) Misi**

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

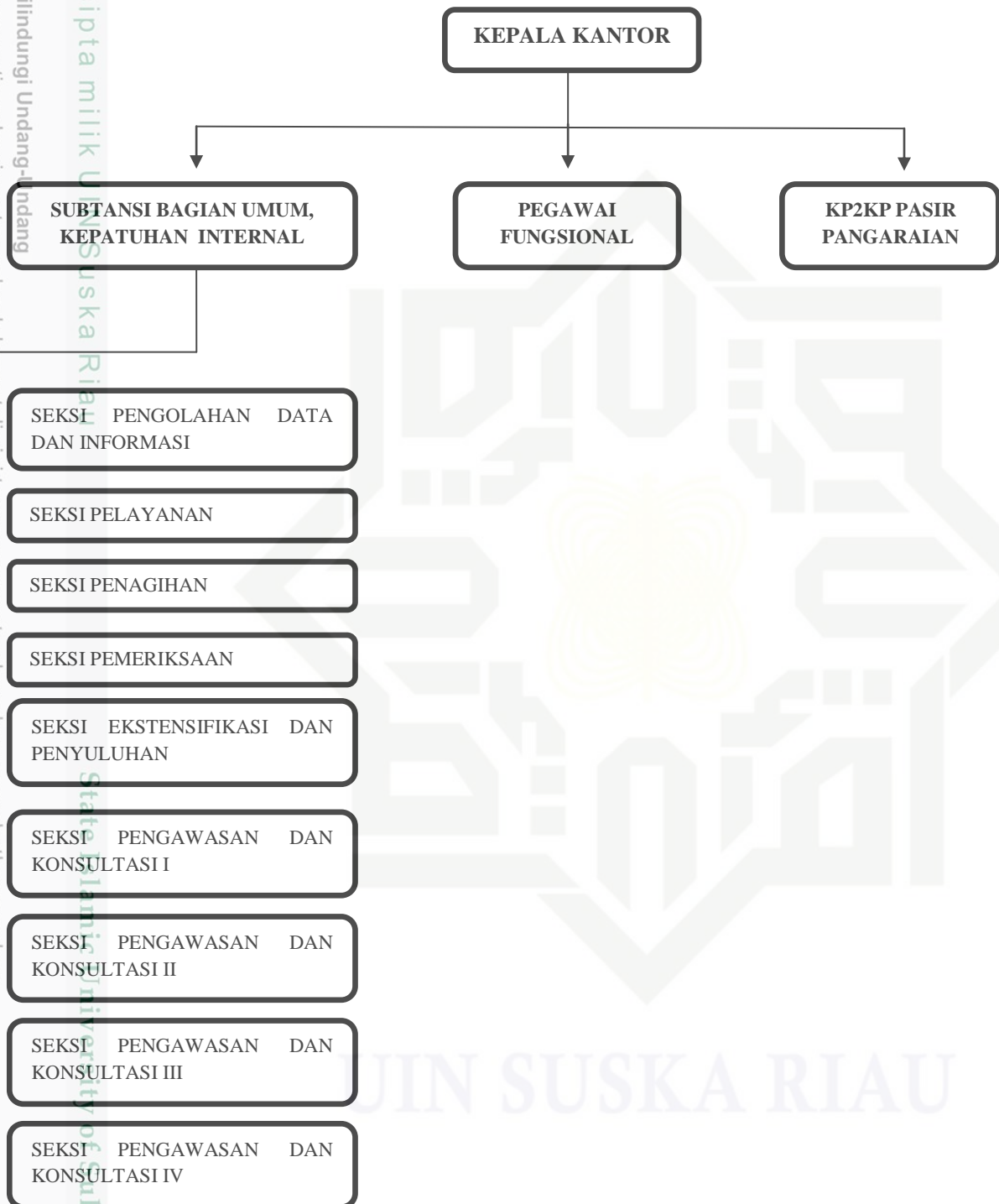
## **2. Kelembagaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

### **a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**

Struktur KPP Pratama Bangkinang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 3) Seksi Pelayanan
- 4) Seksi Penagihan
- 5) Seksi Pemeriksaan
- 6) Seksi Ekstensifikasi
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- 11) Seksi Fungsional

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Uraian Tugas Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Tugas struktur organisasi KPP Pratama Bangkinang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP tugas-tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

### 1) Kepala Kantor

Pimpinan yang memiliki tugas mengatur keseluruhan di segala bidang, dan memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, masukan dan kebijaksanaan dalam mewujudkan kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.<sup>24</sup>

### 2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Bertugas dalam menjalankan urusan yang berkenaan dengan kegiatan tata usaha, kepegawaian (pengelolaan kinerja pegawai), keuangan serta rumah tangga agar tugas berjalan dengan lancar.<sup>25</sup>

### 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bertugas dalam mengumpulkan, pengamatan potensi perpajakan, pengelolaan data, kemudian menyediakan informasi terkait Perpajakan, pengalokasian pajak, menyediakan layanan

<sup>23</sup> Klik Pajak, *Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi dan Struktur KPP Pratama*, diakses melalui [http://klikpajak.id/blog/kenali-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/3sejarah\\_singkat\\_KPP\\_Pratama](http://klikpajak.id/blog/kenali-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/3sejarah_singkat_KPP_Pratama) tanggal 15 April 2021

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan dalam teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, dan membuat laporan kinerja.

4) Seksi Pelayanan

Bertugas menetapkan serta menerbitkan produk hukum Perpajakan, pengadministrasian dokumen Perpajakan, pengelola dan penerima surat pemberitahuan dan lainnya, melakukan penyuluhan perpajakan, melaksanakan registrasi wajib pajak dan melakukan kerja sama dalam bidang Perpajakan.<sup>26</sup>

5) Seksi Penagihan

Bertugas dalam proses urusan penatausahaan piutang pajak dan atau urusan lainnya, baik dalam menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, surat teguran (ST), surat paksa (SP), surat perintah melakukan penyitaan (SPMP), surat penyitaan.<sup>27</sup>

6) Seksi Pemeriksaan

Bertugas dalam penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.<sup>28</sup>

7) Seksi Ekstensifikasi

Bertugas membantu kepala kantor dalam mengkoordinasikan potensi perpajakan baik dalam pelaksanaannya

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemantauannya. Seksi Ekstensifikasi memproses dokumen penatausahaan, kemudian penelitian atas objek pajak baru yang akan didaftarkan, menerbitkan surat himbauan ber-NPWP, mencari bukti kepada pihak ketiga untuk pemuktahiran Bank data perpajakan dan potensi perpajakan, serta pelaksanaan penilaian individual terhadap objek pajak.<sup>29</sup>

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas dari seksi pengawasan dan konsultasi I adalah melakukan proses penyelesaian permohonan oleh WP, melakukan bimbingan serta konsultasi mengenai teknis perpajakan kepada WP, dan juga pengusulan atas pengurangan PBB. Sedangkan seksi pengawasan dan konsultasi II, III, IV bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh WP, melakukan penyusunan data diri WP, analisis kinerja WP, menyamakan data WP terhadap intensifikasi WP. Seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi WP di kawasan Kabupaten Kampar, sedangkan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi EP di kawasan Kabupaten Rokan Hulu.<sup>30</sup>

9) Seksi Fungsional/ Pegawai Fungsional

Pegawai fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor KPP Pratama Bangkinang. Yang terbagi atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai PBB.

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Pejabat Fungsional Pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan yang bekerjasama dengan seksi pemeriksa, sedangkan Pejabat Fungsional Penilai PBB bekerjasama dengan seksi ekstensifikasi.<sup>31</sup>

## B. Desa Bangun Jaya

### 1. Gambaran Umum Desa Bangun Jaya

Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambusai Utara terletak antara 100°45' – 100°52' Bujur Timur dan 0°25' – 0°23' Lintang Utara, yang luas wilayahnya mencapai 38,08 km<sup>2</sup> dengan tinggi wilayah 67 m di atas permukaan air laut.<sup>32</sup>

Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas dengan wilayah lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tambusai Utara
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Harapan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Kumu
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekar Jaya

Desa Bangun Jaya Jarak dari Ibu kota Provinsi ± 225 KM yang ditempuh waktu ± 6 Jam, dari Ibu kota Kabupaten ± 48 KM dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Yang terdiri dari 40 Rukun Tetangga (RT), 12 Rukun Warga (RW), dan 3 Dusun. Jumlah penduduk Desa Bangun Jaya adalah 7.790 jiwa dengan

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka*, (Rokan Hulu, CV. MN Grafika, 2020), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jumlah laki-laki 4.031 jiwa dan perempuan 3.759 jiwa.<sup>33</sup> Sosial dan kesejahteraan rakyat di Desa Bangun Jaya dapat dilihat dari pemaparan berikut:

a. Prasarana Pendidikan

**Tabel II.1**  
**Prasarana Pendidikan**

NO	Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-kanak	-	4
2.	Sekolah Dasar	4	-
3.	Madrasah Ibtidaiyah	-	1
3.	Sekolah Menengah Pertama	1	-
4.	Madrasah Tsanawiyah	-	1
5.	Sekolah Menengah Atas	1	-
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	1	-
7.	Madrasah Aliyah	-	1

*Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021*

b. Sarana Kesehatan

**Tabel.II.2**  
**Sarana Kesehatan**

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Rumah Sakit Bersalin	-
3.	Klinik	4
4.	Bidan	2
5.	Apotek	3

*Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021*

c. Tempat Peribadatan

**Tabel.II.3**  
**Tempat Peribadatan**

NO	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	14
2.	Mushola	43
3.	Gereja Katolik	1
4.	Gereja Protestan	1

*Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Rokan Hulu 2021*

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Kecamatan Tambusai Utara Dalam Angka 2020*, (Rokan Hulu, CV. MN. Gtafika, 2020), h.1-82



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Pendidikan**

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Lulus Perkuliahan	283 orang	9,6%
2.	Lulus Sekolah Menengah Atas	511 orang	12%
3.	Lulus Sekolah Menengah Pertama	117 orang	4,2 %
4.	Lulus Sekolah Dasar	750 orang	16,8%
5.	Lulus Taman Kanak-kanak	424 orang	12,9%
6.	Tidak Menyelesaikan Pendidikan SD, SMP dan SMA	1.958 orang	19,3%
7.	Tidak Mengenyam Pendidikan	2.520 orang	25,2 %
Jumlah		5.988 orang	100%

*Sumber Data: Badan Statistik Desa Bangun Jaya 2021*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas adalah penduduk yang tidak mengenyam pendidikan yaitu 2.520 orang dengan persentase 25,2(%).

e. Kondisi Perekonomian

Perekonomian Desa Bangun Jaya sudah mencapai 92,8% sehingga sudah dapat dikatakan baik, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan berdagang, untuk lebih lanjutnya akan dipaparkan melalui tabel berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.5**  
**Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	TNI	5 orang	0,14%
2.	PNS	155 orang	4,3%
3.	POLRI	5 orang	0,14%
4.	Pedagang	261 orang	7,26%
5.	Petani	1. 686 orang	46,8%
6.	Buruh Tani	781 orang	21,7%
7.	Peternak	623 orang	17,3%
8.	Montir	50 orang	1,4%
9.	Tukang Kayu	15 orang	0,42%
10	Penjahit	15 orang	0,42%
Jumlah		3.596 orang	100%

*Sumber Data: Badan Statistik Desa Bangun Jaya 2021*

Dari data di atas dapat dilihat mayoritas mata pencaharian di Desa Bangun Jaya adalah petani yaitu 1.686 orang dengan persentase 46,8(%), kemudian minoritas mata pencaharian di Desa Bangun Jaya adalah TNI yang berjumlah 5 orang dengan persentase 0,14(%) dan POLRI sebanyak 5 orang dengan persentase 0,14(%).

f. Visi Dan Misi

Dalam Proses Pemerintahan Desa Bangun Jaya memiliki visi serta misi yang jelas sebagai berikut:

1) Visi

- a) Memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat serta seluruh lapisan pemuda dalam pembangunan desa, sebagai pilar mewujudkan desa yang mandiri dan berkembang.
- b) Mengaktifkan karnibmas sebagai wujud kepedulian sosial dalam rangka menciptakan kehidupan yang aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memberdayakan seluruh masyarakat desa dan seluruh tokoh masyarakat desa dalam rangka menyelesaikan segala persoalan desa dan masyarakat, salah satunya dalam persoalan pengelolaan aset desa dan memperjelas tapak batas desa serta persoalan-persoalan lainnya.
- d) Meningkatkan kinerja satuan perangkat desa dalam rangka mengupayakan pelayanan penuh terhadap masyarakat.
- e) Mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapat hidup layak dan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya.
- f) Meningkatkan segala bentuk pembelaan terhadap hak-hak masyarakat bagi seluruh warga masyarakat desa.<sup>34</sup>

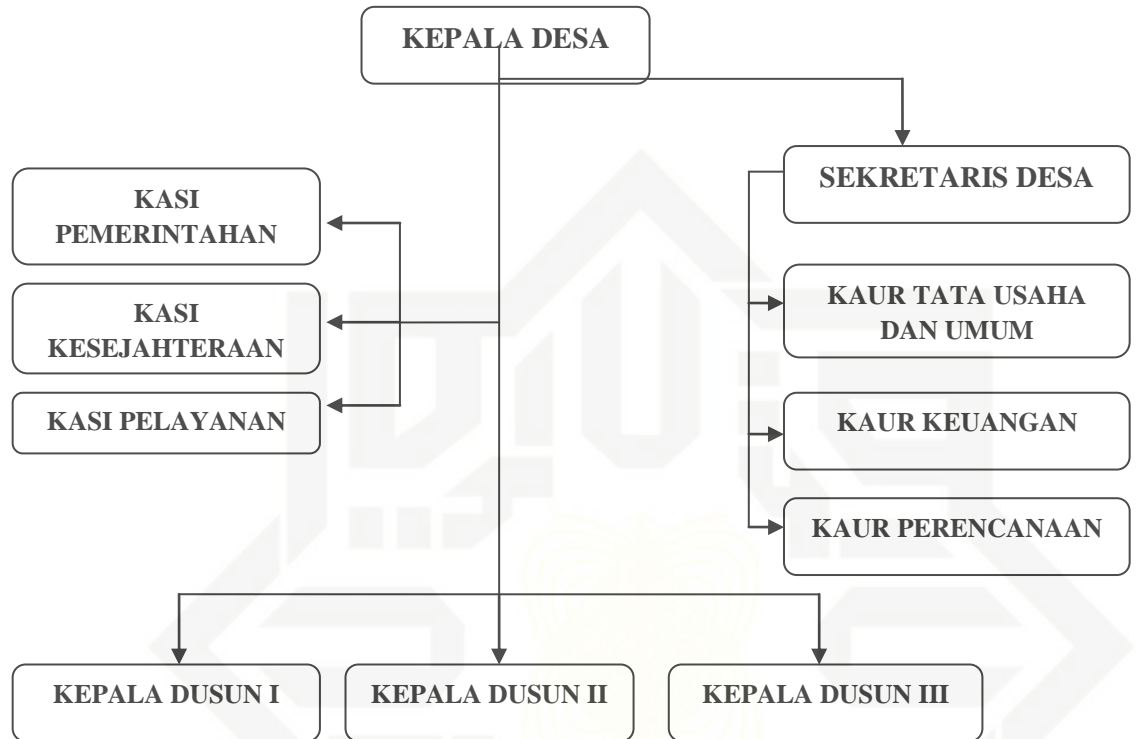
2) Misi

Mewujudkan masyarakat mandiri pedesaan yang berdaya guna untuk menciptakan desa yang mandiri dan berkembang.

<sup>34</sup> Badan Statistik Desa Bangun Jaya 2021

## 2. Organisasi Pemerintahan Desa Bangun Jaya

**Gambar II.2**  
**Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Bangun Jaya**



### C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sebelum membahas mengenai sejarah UMKM, lebih dulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan UMKM. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan tenaga, fikiran serta badan untuk mencapai maksud tertentu; pekerjaan untuk mencapai sesuatu (dengan bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh upaya dan kerjakeras); kegiatan dibidang perdagangan<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 dikatakan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sekitar tahun 1997 terjadi krisis ekonomi terjadi di Indonesia, dan menjadi awal berkembangnya UMKM. Pada masa itu banyak pelaku usaha yang melakukan PHK secara ekstrem untuk menjaga kestabilan usahanya. hal inilah yang memicu lahirnya usaha-usaha yang dibuat atau dicetuskan dari karyawan-karyawan yang di PHK.

Usaha-usaha yang mereka rintis disebut dengan UMKM karena usaha-usaha tersebut tidak hanya berpatok pada satu jenis usaha melainkan usaha yang berbeda-beda. Kemudian dengan hadirnya UMKM mampu menunjang pertumbuhan ekonomi serta membuka lowongan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan.

Hari Nasional UMKM diperingati setiap tanggal 12 Agustus, yang merupakan hasil dari Kongres Yogyakarta pada bulan Mei 2016. Tanggal tersebut diambil dari tanggal lahirnya Bapak Koperasi “Bung Hatta” pada tanggal 12 Agustus 1902<sup>36</sup>. Sedangkan Hari Internasional UMKM diperingati setiap tanggal 27 Juni yang diperjuangkan oleh organisasi yang bernama ICBS (*International Council for Small Bussines*) yang merupakan organisasi dunia yang berdiri sejak tahun 1958 yang fokus pada UKM. Negara-Negara yang termasuk inisiator UMKM yaitu Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Argentina, Mesir dan Indonesia. Perwakilan Indonesia pada saat itu A.A.G.N Puspayoga yang

<sup>36</sup> Analisa, *Sejarah dan Pentingnya Hari Nasional UMKM*, diakses melalui <https://analisa.id/sejarah-dan-pentingnya-hari-nasional-umkm-12-agustus/12/08/2019/> tanggal 13 Maret 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan Menteri Koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2016 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.<sup>37</sup>

Perkembangan UMKM dari data yang di dapat dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia totalnya mencapai 64.194.057 unit usaha, sedangkan Usaha Besar hanya 5.550 unit usaha. Pembagian UMKM akan dijelaskan sebagai berikut:

**Table II.6**  
**UMKM Pada Tahun 2018**

NO	JENIS UMKM	PRESENTASE	JUMLAH
1.	Usaha Mikro	98,68%	63.350.222
2.	Usaha Kecil	1,22%	783.132
3.	Usaha Menengah	0.09%	60.702
4.	Usaha Besar	0.01%	5.550
JUMLAH		100%	64.199.606

*Sumber Data :Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia*

Dari data tahun 2018 mayoritas UMKM adalah Usaha Mikro dengan jumlah usaha sebanyak 63.350.222 dengan persentase 98,68(%).

Sedangkan tahun 2019 presentase unit usaha UMKM dan Usaha Besar akan dijelaskan sebagai berikut:

**Table II.7**  
**UMKM Pada Tahun 2019**

NO	JENIS UMKM	PRESENTASE	JUMLAH
1.	Usaha Mikro	98,68%	63.350.222
2.	Usaha Kecil	1,22%	783.132
3.	Usaha Menengah	0.09%	60.702
4.	Usaha Besar	0.01%	5.550
JUMLAH		100%	64.199.606

*Sumber Data :Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia*

<sup>37</sup> Budi Nugraha, *Indonesia Gelar Puncak Peringatan Hari UMKM Internasional Serentak di Empat Kota*, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/93757/indonesia-gelar-puncak-peringatan-hari-umkm-internasional-serentak-di-empat-kota> tanggal 13 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Data pada tahun 2019 jenis UMKM yang mayoritas masih pelaku Usaha Mikro dengan jumlah 63.350.222 dengan persentase 98,68(%).

Dari data 2018-2019 tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang terjadi pada UMKM dan Usaha Besar. Sedangkan pada tahun 2020 belum ada informasi mengenai pembaharuan data UMKM. Dari informasi yang dilansir dari *Website* Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia/ [umkm.depkot.go.id](http://umkm.depkot.go.id) mengenai data UMKM Provinsi Riau terdapat 167.736 unit UMKM, dan di Kabupaten Rokan Hulu ada 1219 unit yang terdaftar. Kecamatan Tambusai Utara memiliki 204 unit UMKM yang mana pada Desa Bangun Jaya hanya ada 50 unit UMKM atau 19,61% dari keseluruhan UMKM yang ada di Kecamatan Tambusai Utara.

Pandemi COVID-19 menggrogoti ekonomi rakyat yang mengakibatkan rakyat mengalami kesulitan keuangan, karena stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat yang terganggu baik dari pelaku usaha ataupun pekerja. Berdasarkan perintah Presiden mengenai mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Pemerintah berkerjasama dalam membuat program yang digunakan sebagai antisipasi dampak COVID-19 terhadap koperasi dan UMKM. Program-program tersebut yaitu:

- a. Stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi;
- b. Belanja di warung tetangga;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro;
- d. Restrukturisasi khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM;
- e. Program masker untuk semua;
- f. Memasukkan sektor mikro kedalam klaster penerima kartu prakerja bagi pekerja harian;
- g. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- h. Relaksasi pajak;
- i. Pembelian produk UMKM oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>38</sup>

**3. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Secara umum ada 3 (tiga) peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, pertama sebagai sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, kedua sebagai sarana mengentaskan kemiskinan dan ketiga sebagai sarana pemasukan devisa bagi negara. Di lansir dari *website* *kompas.com* bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau yang dikenal dengan nama Bapenas bahwa UMKM memiliki peran yang besar yaitu: 1). Perluasan kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja; 2). Pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB); 3). Membentuk kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah.

UMKM berkontribusi tidak hanya di dalam pembangunan tetapi juga terhadap perekonomian, karena UMKM tidak hanya berkembang di negara berkembang tetapi juga negara maju, memerlukan tenaga kerja

<sup>38</sup> Friska Yolandha, *Kemenkop Terapkan Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap UMKM*, diakses melalui <https://republika.co.id/berita/q8tjn2370/kemenkop-terapkan-mitigasi-dampak-covid19-terhadap-umkm> tanggal 16 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih banyak (penyerapan tenaga kerja), dan besarnya kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB.<sup>39</sup>

#### 4. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan usaha untuk membangun perekonomian nasional yang didasarkan atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat beberapa peranan UMKM dalam mencapai tujuannya antara lain:

- a. Pasal 5, UMKM berperan dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan.
- b. Pasal 7, UMKM berperan aktif dalam menumbuhkan iklim usaha.
- c. Pasal 16, UMKM berperan aktif dalam pengembangan usaha baik dalam proses produksi (pengolahan, pemasaran), sumber daya manusia, desain dan teknologi dalam pengembangan usaha yang difasilitasi oleh pemerintah/ pemerintah daerah.
- d. Pasal 23, UMKM berperan dalam pembiayaan serta penjaminan dalam menaikkan akses UMKM terhadap pinjaman dengan meningkatkan kemampuan studi kelayakan usaha, pemahaman dan keterampilan teknis mengenai usaha dan mengenai prosedur pinjaman.

UMKM dinilai penting baik di negara berkembang ataupun di negara maju karena jumlah unit usahanya yang besar, merupakan padat

<sup>39</sup> Kompas, *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*, diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all> tanggal 16 Maret 2021

karya yang mengakibatkan besarnya kesempatan kerja serta mendapatkan pendapatan, adanya unit usaha yang beroperasi di daerah desa, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan usahanya.<sup>40</sup>

#### **D. Dasar Hukum Insentif Pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 dikatakan bahwa insentif pajak dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Corona Virus Disease* 2019.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima selama kurun waktu 1 tahun.<sup>41</sup> Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh final sebesar 0,5 % dari jumlah peredaran bruto”<sup>42</sup>, yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah

<sup>40</sup> Imelda Halim, Skripsi: *Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM dalam Masa Pandemi Covid -19*, (Sumatera Utara: USU, 2020), h. 30

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan pendapatan yang diterima tanpa adanya pengurangan biaya lain yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.<sup>43</sup> Pada ayat (2) point (a) dan (b) dijelaskan bahwa penyeteroran dilakukan langsung oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dipotong atau dipungut oleh pihak yang telah ditunjuk. Selanjutnya pada ayat (3) dikatakan bahwa PPh final ditanggung oleh Pemerintah yang mana tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, dan berlangsung dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Untuk mendapatkan insentif pajak WP harus menyampaikan realisasi PPh final melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

---

<sup>43</sup> Mekari, *Perhitungan Bruto Wajib Pajak Badan, Perhitungan dan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto*, diakses melalui [https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pengertian-peredaran-bruto-wajib-pajak-badan/#Pengertian\\_Pedaran\\_Bruto](https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pengertian-peredaran-bruto-wajib-pajak-badan/#Pengertian_Pedaran_Bruto) tanggal 16 Maret 2021



## A. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Dalam Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia pajak berasal dari kata *belasting* (Belanda), *burdening/taxation/rating* (Inggris). *Belasting* diartikan sebagai perpajakan/pajak, fiskal, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.<sup>44</sup> Bustamar Ayza mengutip istilah yang digunakan Safri Nurmantu mengenai pajak; *tax; import contribution, taxe, droit; steuer, abgade, gebuhr; tributo; impuesto contributio; gravamen; tasa*; dan *belasting* ada juga yang menggunakan istilah *tariff*.

Menurut Purwadarminta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara baik pemerintahan pusat, provinsi, daerah dan lain sebagainya, yang terdiri dari beberapa pembagian, yaitu pajak mengenai tanah/bumi, jalan, kekayaan, peralihan, perseroan dan lain sebagainya.

Rochmat Soemitro mengatakan bahwa pajak adalah iuran wajib (yang dapat dipaksakan) kepada negara tanpa adanya kompensasi

<sup>44</sup> Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung serta digunakan untuk kepentingan umum<sup>45</sup>. Smeets mendefinisikan bahwa<sup>46</sup>:

*“Belasting zijn aan de overheid, (volgens normen) verschu- ligde, afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen prestaties staan, zij strekken tot dekking van publieke uitgaven”*

“ pajak merupakan prestasi yang ditujukan kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukkan kepada perseorangan.”

P.J.A. Andriani pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan, tanpa adanya prestasi kembali, dan digunakan dalam pengeluaran-pengeluaran umum yang berkenaan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.<sup>47</sup> Selain itu Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Block Horace R., berpendapat bahwa pajak merupakan suatu pengaliran sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintahan, bukan akibat dari pelanggaran hukum tetapi memiliki kewajiban untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak ada imbalan yang diterima secara langsung, karena digunakan dalam menjalankan pemerintahan.<sup>48</sup>

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, kemudian berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: 2016), h. 3

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>47</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.2

<sup>48</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terdiri atas unsur-unsur iuran rakyat kepada negara, yang didasarkan oleh Undang-Undang, tidak adanya imbalan langsung kepada rakyat, dan digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam pemerintahan, khususnya dalam hal pembiayaan dan pembangunan. Dari peran ini pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:<sup>49</sup>

- a. Fungsi *budgeter* (penerimaan) yaitu pajak yang didapat dari WP digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintahan, dan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pajak digolongkan dalam sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi *regulator* (mengatur) yaitu pajak berperan dalam kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.
- c. Fungsi *stabilitas* yaitu pajak mampu menjaga stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflansi.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fungsi redistribusi yaitu pajak berfungsi menekankan pada keadilan dan kesamarataan di dalam masyarakat, maksudnya di dalam pembayaran pajak WP memiliki kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penghasilan yang didapatkannya.

Menurut Mardiasmo pajak berfungsi sebagai anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).<sup>50</sup>

### 3. Jenis Pajak

Pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah keseluruhan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Departemen Keuangan, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola di daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Pajak-pajak yang dikelola oleh DJP terbagi atas:<sup>51</sup>

- a. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan karena penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan karena konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah Pabean.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk kedalam barang mewah, barang mewah yang dimaksud bukanlah barang yang tergolong dalam

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>51</sup> *Ibid*, h.4- 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pokok melainkan dikonsumsi oleh orang-orang tertentu yang biasanya digunakan untuk menunjukkan status sosial.

- d. Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen yang menyangkut nominal uang atau jumlah dengan ketentuan tertentu.
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang atau badan atas kepemilikan atau pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi

Pajak yang tergolong dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor; pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak pokok.

- b. Pajak Kabupaten/ Kota

pajak yang dikategorikan dalam pajak kabupaten kota adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB perdesaan dan kota, serta BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

#### 4. Asas- Asas Perpajakan di Indonesia

Untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak, ada asas- asas yang dikemukakan oleh ahli dalam pemungutan pajak, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. W.J. Langen berpendapat bahwa asas dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Asas daya pikul yaitu pungutan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan WP, atau sesuai dengan besar atau kecilnya penghasilan WP
- 2) Asas manfaat yaitu hasil yang diperoleh dari pungutan pajak digunakan untuk hal-hal/ kegiatan- kegiatan yang berguna untuk orang banyak/ kepentingan umum
- 3) Asas kesejahteraan yaitu hasil yang diperoleh dari pungutan pajak digunakan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat
- 4) Asas kesamaan yaitu setiap WP memiliki kedudukan yang sama, atau diperlakukan secara adil sesuai dengan situasi yang sama
- 5) Asas beban yang sekecil- kecilnya yaitu dalam pungutan pajak harus mengutamakan WP agar dalam pungutan itu tidak memberatkan WP, sehingga pungutan yang harus dibayar WP lebih kecil dari nilai objek pajak.

b. Adam Smith berpendapat bahwa asas dalam pungutan pajak terbagi atas:<sup>53</sup>

- 1) Asas *equality* atau yang sering dikenal dengan sebutan asas keseimbangan atau asas kesamaan, dimana setiap WP memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak boleh adanya diskriminatif terhadap WP

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 13

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Asas *certainty* yaitu adanya kepastian hukum sehingga apabila pungutan pajak tidak dibayarkan oleh WP maka ada sanksi yang diterima oleh WP
  - 3) Asas *convenience of payment* atau asas kesebandingan atau asas pungutan pajak tepat waktu, maksudnya adalah pungutan pajak terhadap WP dilakukan disaat waktu yang benar atau tepat
  - 4) Asas *efficiency* atau yang dikenal dengan asas ekonomis, dalam pungutan pajak harus memperhitungkan biaya pungutan pajak sehingga tidak melebihi hasil pungutan pajak.
- c. Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave di dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice* menjelaskan dua asas keadilan dalam pungutan pajak yaitu<sup>54</sup>
- 1) *Benefit principle* yaitu keadilan di dalam sistem perpajakan dapat dicapai apabila WP membayar pungutan pajak sesuai dengan keuntungan yang dapat dinikmatinya (fasilitas yang bersifat umum)
  - 2) *Ability principle* yaitu pendekatan dalam sistem perpajakan ini dilakukan dengan melihat kemampuan WP dalam membayar pungutan pajak sesuai dengan keadaan WP.
- d. Adolf Wagner membagi asas pemungutan pajak sebagai berikut:<sup>55</sup>
- 1) Asas politik finansial yaitu pungutan pajak digunakan dalam kegiatan negara.

<sup>54</sup> *Ibid*, Imelda Halim, h. 61

<sup>55</sup> *Ibid*, Aristanti Widyaningsih, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Asas ekonomi yaitu hal ini berkaitan dengan penentuan objek pajak agar tidak terjadi kekeliruan.
  - 3) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum.
  - 4) Asas administrasi yaitu hal ini berkaitan dengan kepastian perpajakan, eluwasan penagihan dan besarnya biaya pajak.
  - 5) Asas yuridis yaitu pungutan pajak didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas pengenaan pajak yang dipakai oleh negara dalam menentukan wewenangnya dalam menentukan pengenaan pajak, khususnya dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>
- 1) Asas domisili/ asas kependudukan (*domicile/ residence principle*) yaitu negara mengenakan pajak kepada WP sesuai dengan penghasilan yang mana WP berkedudukan atau berdomisili di wilayah tersebut.
  - 2) Asas sumber yaitu negara menetapkan pajak kepada WP berdasarkan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan yang berdomisili atau bertempat di wilayah tersebut.
  - 3) Asas kebangsaan/ asas nasionalitas/ asas kewarganegaraan (*notionality/ citizenship principle*) yaitu pungutan pajak dilandasi oleh status kewarganegaraan dari WP memperoleh penghasilan.

---

<sup>56</sup> Ibid, Aristanti Widyaningsih, h. 13-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teori Pemungutan Pajak

Hak negara dalam melakukan pemungutan pajak didasarali oleh Teori- teori pemungutan pajak sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Teori asuransi adalah pajak diibaratkan sebagai pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Ada yang meolak teori ini karena menganggap negara disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan adalah pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan setiap warga negara baik jiwa dan harta.
- c. Teori daya pikul adalah pungutan pajak digunakan dalam penetapan pajak yang harus dibayarkan dengan meilihat unsur objektif (besar penghasilan seseorang), dan unsur objektif (kebutuhan materil yang harus dipenuhi oleh seseorang).
- d. Teori bakti adalah dalam pungutan pajak didasari oleh rasa bakti rakyat yang diberikan kepada negara.
- e. Teori asas daya beli adalah teori ini dilihat dari akibat pemungutan pajak.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>58</sup>

- a. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* 1). Fiskus memegang wewenang dalam menentukan besarnya pajak

<sup>57</sup> *Ibid*, Aristanti Widyaningsih, h. 11-12

<sup>58</sup> *Ibid*, Aristanti Widyaningsih, h. 15- 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutang; 2). WP bersifat pasif; 3). Fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk mengetahui utang pajak.

- b. *Self Assessment System* memberikan WP kewenangan atas tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang sebagai WP.
- c. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga dalam memungut besarnya pajak terutang oleh WP.

### 7. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Pemungutan pajak harus adil
- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### B. Insentif Pajak

Insentif diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan motivasi dan menyebarkannya secara masal. Sedangkan secara tradisional insentif merupakan tindakan yang melebihi ekspektasi dari hasil yang diinginkan dan membentuk motivasi dari luar.<sup>60</sup> Di dalam KBBI insentif diartikan sebagai tambahan penghasilan baik berupa barang, uang atau lainnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; dan uang perangsang.

<sup>59</sup> *ibid*, Aristanti Widyarningsih, h. 16-17

<sup>60</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, *Insentif*, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Insentif#:~:text=Insentif%20adalah%20tindakan%20menjadikan%20atau,dan%20membentuk%20motivasi%20dari%20luar> tanggal 19 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Erly Suandy insentif pajak merupakan bagian dari fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor dalam suatu wilayah tertentu untuk aktifitas tertentu, yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu.<sup>61</sup>

Menurut Winardi bahwa insentif pajak merupakan prestasi yang diberikan sebagai perangsang.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah ada beberapa macam, tetapi menurut Suandy insentif pajak secara umum yaitu:

1. Pengecualian atas pengenaan pajak;
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak;
3. Pengurangan tarif pajak; dan
4. Penangguhan pajak.

Dikaitkan dengan penelitian, pemberian insentif pajak bahwa UMKM dikecualikan atas pengenaan pajak sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian akibat pandemi COVID-19 atau yang dikenal dengan Pemulihan Perekonomian Nasional (PEN). Hal ini tercantum di dalam PMK Nomor 86 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

### C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata *effective* (bahasa Inggris) yang berarti berhasil atau sebuah pencapaian yang berhasil. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif dan diartikan dengan ada efeknya/ pengaruh/ kesan/ suatu akibat; manjur; dan sesuatu yang membawa

<sup>61</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hasil. Kamus ilmiah juga mendefinisikan mengenai efektivitas sebagai ketetapan oleh pengguna, hasil guna ataupun menunjang tujuan.

Menurut Beni efektivitas berkaitan dengan pencapaian *output* dan tujuan yang harus dicapai, kebijakan serta prosedur organisasi. Efektivitas berhubungan dengan keberhasilan, di dalam sektor *public* mencapai keberhasilan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan di masyarakat memenuhi sasaran yang telah ditentukan<sup>62</sup>

Menurut Mardiasmo bahwa ukuran efektivitas itu mencakup gambaran mengenai dampak dan akibat dari *output* yang dikeluarkan dalam mencapai suatu tujuan, dan semakin besar kontribusi dari *output* yang dikeluarkan maka semakin efektif kerja suatu organisasi itu. Sehingga efektivitas tidak hanya istilah keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>63</sup>

Sedangkan hukum merupakan alat rekayasa sosial dalam menertibkan masyarakat melalui peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dan dilihat dari sudut pandang sosiologi, hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat.<sup>64</sup>

Untuk melihat suatu sistem hukum efektif atau tidak dapat dilihat dari syarat-syarat berikut:<sup>65</sup>

1. Mudah atau sulitnya isi aturan untuk dipahami;
2. Luasnya tidaknya masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut;

<sup>62</sup> Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, Buku I*, (Jakarta Pusat: Taushia, 2016), h. 53

<sup>63</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 21

<sup>64</sup> Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, h. 1-2

<sup>65</sup> Rony Hanitj Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989), h. 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Efisiensi mobilitas hukum yang dicapai;
4. Adanya tempat untuk menyelesaikan sengketa, dan efektifnya dalam menyelesaikan sengketa tersebut;
5. Adanya pernyataan masyarakat bahwa efektifnya peraturan tersebut.

Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam membahas efektivitas hukum maka juga membahas validitas hukum. Validitas hukum merupakan norma-norma yang mengikat di dalam peraturan, sehingga masyarakat harus berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan hukum. Sehingga efektivitas hukum kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang ada.<sup>66</sup>

Di dalam karya tulis ilmiah Sandra Fitriyana ia mengutip teori efektivitas hukum dari Clerence J. Dias, ia berpendapat bahwa:

*“an effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congrunce between legal rule and human conduct. This an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and operative legal system is scured by:*

1. *The intelligibility of it legal system*
2. *High level public knowledge of the content of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A comitted administration*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes*
5. *A widely share perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

“efektif atau tidaknya sistem hukum disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Mudah atau sulitnya pemahaman mengenai aturan-aturan
2. Banyaknya masyarakat yang mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut
3. efektif dan efisien mobilitas dari aturan-aturan tersebut
  - a. komitmen administrasi
  - b. masyarakat yang terlibat dan keikutsertaannya dalam proses mobilitas hukum
4. Adanya tempat penyelesaian sengketa, yang mudah bagi masyarakat dan efektif dalam penyelesaian sengketa

<sup>66</sup> Sabian Usman *Dasar- Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

5. Adanya pengakuan dari setiap orang mengenai efektif aturan-aturan tersebut”

Menurut A. Allot efektifitas hukum adalah hukum yang menjadi efektif jika dengan adanya hukum tersebut serta penerapannya dapat mengakibatkan ketentraman dan menghilangkan kekacauan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas hukum adalah kaidah yang menjadi acuan dalam menentukan sikap atau perilaku yang baik, dan dalam efektivitas hukum tidak hanya kepatuhan masyarakat tetapi juga penegak hukumnya. Efektivitas hukum dapat dilihat dari hasil akhir yang dicapai atau tujuan yang dicapai, apakah sesuai dengan tujuan awal apakah tidak. Dan pada dasarnya untuk mencapai tujuan, suatu peraturan biasanya dibarengi dengan sanksi- sanksi baik sanksi negatif ataupun positif, karena digunakan untuk menimbulkan rangsangan kepatuhan atas hukum.<sup>67</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:<sup>68</sup>

1. Faktor hukum sendiri

Undang-undang dapat diartikan secara materil atau dengan kata lain sebagai peraturan yang berlaku secara umum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang baik di pusat atau daerah. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada asas-asas yang dapat mempengaruhi efektifitas dari hukum, asas-asas tersebut yaitu:

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 14, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan yang tidak berlaku surut artinya suatu aturan hanya berlaku bagi peristiwa yang terdapat di dalam undang-undang itu yang dinyatakan berlaku
- b. *Lex specialist derogat legi generalis* yaitu undang-undang yang sifatnya khusus lebih diutamakan dari undang-undang yang bersifat umum
- c. *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula
- d. *Lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang baru lebih diutamakan daripada peraturan yang lama
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang adalah sarana mencapai kesejahteraan spiritual serta materil secara umum ataupun pribadi.

#### 2. Faktor penegak hukum

Yang termasuk ke dalam ruang lingkup penegak hukum adalah keseluruhan pejabat ataupun instansi yang berperan langsung ataupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Dan menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak hanya dalam pelaksanaan hukum (*law eforcement*) tetapi juga yang langsung turun dalam proses penegakan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor sarana prasarana

Sarana serta fasilitas juga berperan dalam efektifitas hukum karena dalam pelaksanaannya. Dan dalam pemikiran dalam mencukupi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan antara lain yaitu:<sup>69</sup>

- a. Sarana atau fasilitas yang tidak ada – harus terealisasi/ diadakan
- b. Sarana atau fasilitas yang kurang baik atau rusak – harus diperbaiki
- c. Kekuarangan sarana atau fasilitas – ditambah
- d. Sarana atau faslitas yang macet – dilancarkan
- e. Sarana atau fasilitas yang mengalami kemerosotan – ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Hukum berlaku dan berperan di dalam masyarakat, sehingga di dalam penegakan hukum ada peran masyarakat di dalamnya serta hukum ditujukan untuk mencapai tujuan negara salah satunya adalah kesejahteraan rakyat.

5. Faktor kebudayaan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dan di dalam faktor kebudayaan terdapat nilai spiritual serta non materil. Sehingga dalam sistem hukum harus mencangkup nilai kebudayaan selain nilai struktur serta substansi di dalamnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan dan pemberlakuan hukum dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 19



dari pemberlakuan hukum tersebut serta mencapai ketentraman di dalam masyarakat.

#### D. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut KBBI kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti menurut terhadap perintah, atau patuh dan taat terhadap suatu peraturan atau perintah dan disiplin. Kepatuhan dapat diistilahkan dengan bersifat patuh; ketaatan; tunduk pada suatu aturan.

Menurut H.C. Kelman *compliance* merupakan kepatuhan atas usaha yang dilakukan untuk menghindari sanksi atau hukuman, dan atau kepatuhan yang didasari oleh keinginan mendapatkan balasan atau imbalan.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Tyler terdapat 2 perspektif kepatuhan terhadap hukum yaitu instrumental (individu dan kepentingan pribadi serta tanggapan atas perubahan perilaku) dan normatif (berhubungan dengan moral serta dengan sifat yang berlawanan terhadap kepentingan pribadi).<sup>71</sup> Perspektif normatif pada moralitas personal maka ia menganggap hukum adalah suatu yang harus dipatuhi, sedangkan pada legitimasi maka kepatuhan terhadap hukum disebabkan otoritas pembentuk hukum.

Kelman membedakan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum dalam 3 bagian yaitu:

<sup>70</sup> Anggraeni & Kiswaran, Skripsi: *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 46

<sup>71</sup> Widya Herliana, Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*, (Jakarta: Universitas Bakrie, 2016), h. 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ketaatan *compliance* yaitu ketaatan yang muncul karena ketakutan atas sanksi yang dibuat atas suatu peraturan
2. Ketaatan *identivication* yaitu ketaatan yang muncul karena rasa takut apabila hubungan yang dijalin dengan orang lain menjadi rusak
3. Ketaatan *internalisation* yaitu ketaatan yang muncul karena aturan tersebut sesuai dengan nilai intrinsik orang tersebut.

Peraturan dapat berjalan efektif apabila seseorang memiliki nilai ketaatan *internalisation*, karena dianggap peraturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki fungsi pengontrolan yang kuat.

Kepatuhan berkaitan erat dengan teori atribusi. Untuk pertama kalinya teori atribusi dikenalkan oleh Heider, kemudian dijabarkan oleh Robbins dan Judge bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai pengamatan individu dalam perilakunya. Apakah perilaku yang ditimbulkan oleh individu tersebut disebabkan secara internal (perilaku yang timbul disebabkan kendali pribadi seseorang tersebut) dan secara eksternal (perilaku yang timbul disebabkan oleh penyebab dari luar/ tekanan dari situasi).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Nabilah Jasmin Prasmaning Putri dan Syaiful Iqbal, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 belum terlaksana dengan baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) bahwasannya WP yang memiliki peredaran bruto sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5% dari keseluruhan peredaran bruto, kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa PPh Final ditanggung oleh Pemerintah. Beberapa hal yang menghambat dalam pelaksanaan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yaitu: mengenai penginformasian yang kurang baik, gagap teknologi, pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran WP.
2. Dampak pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dalam bidang UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Dampak bagi pemerintah
- b. Dampak bagi WP (pelaku UMKM) yang mendapatkan insentif pajak PPh Final
- c. Dampak bagi WP (pelaku UMKM) yang tidak mendapat insentif pajak PPh Final.

## B. Saran

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 dalam bidang UMKM di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu diharapkan diharapkan mampu menemukan metode yang lebih efektif dan efisien agar peraturan yang ada berjalan sebagaimana mestinya.

1. KPP Pratama Bangkinang bersama KP2KP Pasir Pengaraian diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai perpajakan tidak hanya melalui media *online* tetapi juga secara empiris atau langsung agar dalam pelaksanaan program perpajakan dapat berjalan dengan baik.
2. Perlunya tanggung jawab KP2KP Pasir Pangaraian merupakan perpanjangan tangan dari KPP Pratama Bangkinang untuk menyampaikan kembali berkenaan dengan insentif pajak kepada masyarakat (pelaku UMKM) dalam menjalankan peraturan dan atau Undang-Undang, sehingga kewajiban dan hak masyarakat dapat terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka*, Rokan Hulu, CV. MN Grafika, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, *Kecamatan Tambusai Utara Dalam Angka 2020*, Rokan Hulu, CV. MN. Gtafika, 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafika, 2011.
- Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, Buku I*, Jakarta Pusat: Taushia, 2016.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak Edisi 5*, Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2011.
- Koesrianti, Dhina Puspitawati, dan Tri Andjarwati, *Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah "Prosedur dan Syarat-syarat Permohonan: Surat Ijin Usaha Perdagangan/ SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan/ TDP"*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: LPPI, 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: 2016.
- M. Hajar, *Metode Penelitian Huku*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

Rony Hanitij Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989.

Sabian Usman, *Dasar- Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 14, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Rachmawan Budiarto, dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

## B. Skripsi/ Jurnal/ Kamus/ Makalah

Anggraeni & Kiswaran, Skripsi: *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Imelda Halim, Skripsi: *Aspek Hukum Pembebasan Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM dalam Masa PandemiCovid -19*, Sumatera Utara: USU, 2020.

Kalina Sofyarto dan Nabitatus Sa'adah, *Implikasi Pembeian Insentif Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata Kota Padang*, Jurnal Law Reform Vol 14 No 1 Tahun 2018.

Nabilah Jasmin Prasmaning Putri dan Syaiful Iqbal, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Widya Herliana, Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Dalam Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*, Jakarta: Universitas Bakrie, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

## D. Website

<https://analisa.id/sejarah-dan-pentingnya-hari-nasional-umkm-12-agustus/12/08/2019/> tanggal 13 Maret 2021

<https://www.ssas.co.id/perpanjangan-insentif-pajak-meringankan-beban/> tanggal 22 Oktober 2021

<https://bisnisbestfriend.co.id/insentif-pajak-mampu-membrikan-dampak-positif-bagi-pelaku-usaha/> tanggal 19 Juni 2021

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/93757/indonesia-gelar-puncak-peringatan-hari-umkm-internasional-serentak-di-empat-kota> tanggal 13 Maret 2021

[http://news.ddtc.co.id/insentif-pajak-positif-atau-negatif-24477?page\\_y=2560](http://news.ddtc.co.id/insentif-pajak-positif-atau-negatif-24477?page_y=2560) tanggal 19 Juni 2021

<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> tanggal 17 September 2020

<https://republika.co.id/berita/q8tjn2370/kemenkop-terapkan-mitigasi-dampak-covid19-terhadap-umkm> tanggal 16 Maret 2021

<https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5ef59a3a27d6c/2-3-juta-umkm-tetap-bayar-pph-final-di-tengah-pandemi-corona>

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all> tanggal 16 Maret 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pengertian-peredaran-bruto-wajib-pajak-badan/#Pengertian Peredaran Bruto](https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pengertian-peredaran-bruto-wajib-pajak-badan/#Pengertian%20Peredaran%20Bruto) tanggal 16 Maret 2021

<https://amp.kontan.co.id/news/utang-negara-di-masa-pandemi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Insentif#:~:text=Insentif%20adalah%20tindakan%20menjadikan%20atau,dan%20membentuk%20motivasi%20dari%20luar> tanggal 19 Maret 2021

<https://www.ssas.co.id/perpanjangan-insentif-pajak-meringankan-beban/> tanggal 22 Oktober 2021

[http://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/3sejarah singkat KPP Pratama](http://klikpajak.id/blog/ketahui-sejarah-tugas-fungsi-dan-struktur-kpp-pratama/3sejarah_singkat_KPP_Pratama) tanggal 15 April 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang"* yang ditulis oleh :

Nama : Hepy Sriwahyuni  
NIM : 11727201891  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Oktober 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
Musrifah, SH., MH

Penguji I  
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji II  
Lysa Anggrayni, SH., MH

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag  
NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**

JALAN CUT NYAK DIEN II NO. 4, PEKANBARU 28116  
 TELEPON (0761) 44825, 44827, FAKSIMILE (0761) 44826; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-50/WPJ.02/KP.1201/2021**

Yth : Kepala Seksi Pelayanan  
 Dari : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) set  
 Hal : Permintaan Narasumber Wawancara Daring tentang Insentif UMKM sesuai Surat S-99/RISET/WPJ.02/2021  
 Tanggal : 16 Juni 2021

Sehubungan dengan Surat dari Kanwil DJP Riau Nomor S-99/RISET/WPJ.02/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Persetujuan Izin Riset wawancara, maka dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menunjuk satu orang pegawai untuk menjadi Narasumber Wawancara Daring tentang Insentif UMKM. Untuk waktu dapat disesuaikan dengan menghubungi pemohon dan daftar pertanyaan terlampir. Berikut disampaikan data pemohon :

Nama : Hepy Sriwahyuni  
 No. HP : 082284672281 (Whatsapp)  
 NIM : 11727201891  
 Perguruan Tinggi /Jurusan : Universitas Sulthan Syarif Kasim / Ilmu Hukum

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
 Bono Iman Pranoto

Tembusan:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

2 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak &lt;riset@pajak.go.id&gt;

Balas ke: riset@pajak.go.id


Kepada: hepysriwahyuni2226@gmail.com

Rab, 24 Mar 2021 pukul 16.03

### BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 02883-2021  
 Tanggal : 24 Maret 2021  
 Nama : Hepy Sriwahyuni  
 NIM : 11727201891  
 Kategori riset : Gelar-S1  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim  
 Judul Riset : Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinan  
 Izin yang diminta : Data,

Terima kasih. Permohonan izin Riset Anda telah kami terima. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda pada laman [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id).

 Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

### PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KUTSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

Eriset Direktorat Jenderal Pajak &lt;riset@pajak.go.id&gt;

Balas ke: riset@pajak.go.id


Kepada: hepysriwahyuni2226@gmail.com

Rab, 24 Mar 2021 pukul 16.06

### BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor : 02884-2021  
 Tanggal : 24 Maret 2021  
 Nama : Hepy Sriwahyuni  
 NIM : 11727201891  
 Kategori riset : Gelar-S1  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim  
 Judul Riset : Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/pmk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinan  
 Izin yang diminta : Wawancara,

Terima kasih. Permohonan izin Riset Anda telah kami terima. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda pada laman [edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id).

 Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

[Kutipan teks disembunyikan]

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38969

T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.U.PP.00.9/2258/2021 Tanggal 19 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

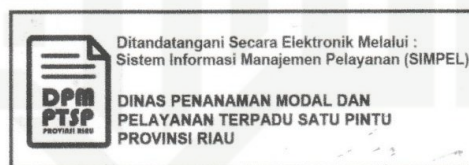
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>HEPY SRIWAHYUNI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>11727201891</b>  |
| 3. Program Studi     | : | <b>ILMU HUKUM</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>S1</b>   |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG (STUDI KASUS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA BANGUN JAYA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>KANTOR PAJAK PRATAMA BANGKINANG</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 23 Februari 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/202

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38969 tanggal 23 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : HEPY SRIWAHYUNI   |
| 2. NIM              | : 11727201891   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG (STUDI KASUS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA BANGUN JAYA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA)</b> |
| 8. Lokasi           | : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : HEPY SRIWAHYUNI**  
**NIM : 11727201891**  
**JURUSAN : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**

**Pembimbing: Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 November 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Hepy Sriwahyuni**, dilahirkan di Desa Bangun Jaya pada 22 Mei 1999. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara, putri dari pasangan Saifudin dan Wiwik Sungkawati. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari TK Anisa Husna di Desa

Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dan selesai pada Tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SD Negeri 012 Tambusai Utara yang berada di Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tamat pada Tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Tambusai Utara yang berada di Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, dan tamat pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Rambah Hilir yang terletak di Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu dan tamat pada Tahun 2017.

Setelah itu pada Tahun 2017 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) sebagai mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis magang di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (PKY Riau) pada Tahun 2019 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Pada tanggal 19 Oktober 2021 penulis dinyatakan lulus dengan skripsi yang berjudul *“Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”*.